

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Buku Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar 2016 – 2020 merupakan buku pedoman yang selalu terbuka untuk dilakukan penyesuaian – penyesuaian berdasarkan kebutuhan mendesak dan kondisi yang dihadapi oleh Kota Denpasar. Perubahan situasi dan kondisi sejalan dengan perkembangan politik, sosial masyarakat, tren teknologi informasi komunikasi, dan kesejahteraan masyarakat. Buku ini harus ditinjau ulang setiap tahun untuk digunakan sebagai salah satu acuan evaluasi pengembangan e-government Kota Denpasar, serta untuk disempurnakan dalam bentuk revisi – revisi. Seluruh SKPD dan Diskominfo sebagai Leading Sector bersama – sama melakukan evaluasi setiap tahun terhadap perencanaan pengembangan e-government yang tertuang dalam buku ini. Sehingga perencanaan jangka panjang pelaksanaan e-government Kota Denpasar guna mewujudkan Kota Cerdas bisa disepakati oleh semua SKPD dan stakeholder Kota Denpasar dengan dipimpin langsung oleh Walikota. Kesepakatan ini akan mempercepat transformasi birokrasi dan penyediaan layanan publik berbasis elektronik. Kesepakatan ini diperlukan karena adanya faktor – faktor yang beresiko munculnya resistensi dari komponen Pemkot yang berkurang kenyamanannya dan terpaksa harus berubah sejalan dengan kebijakan otomatisasi perkantoran.

Pengadaan perangkat TIK tidak serta merta menjadi solusi atas permasalahan peningkatan kinerja pemerintah, output dari pengadaan perangkat adalah berupa alat untuk pelaksanaan implementasi e-government sedangkan e-government itu sendiri merupakan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemahaman ini harus dimiliki oleh seluruh pengelola pemerintah kota sehingga beban kerja implementasi e-government bukan hanya oleh Dinas Kominfo akan tetapi merupakan gerakan bersama seluruh SKPD yang dipimpin langsung oleh Walikota untuk melaksanakannya. Kunci utama gerakan ini adalah perubahan paradigma dari kinerja berbasis manual menjadi kinerja berbasis elektronik. Proses perubahan ini dilakukan untuk jangka panjang serta berkesinambungan. Transformasi ini tidak bisa dinikmati dalam waktu jangka pendek.

Proses transformasi menuju Kota Cerdas selalu memerlukan pendampingan dalam implementasinya, karena investasi sumber daya pembangunan e-government tidaklah sedikit. Dalam hal ini Pemerintah Kota bisa didampingi oleh Dewan TIK seperti yang tertuang dalam

buku ini, serta konsultan perencanaan, konsultan pengadaan, konsultan pelaksana, dan konsultan pengawas. Ada kegiatan yang bisa terlaksana secara berurutan, namun banyak kegiatan yang diusulkan dalam buku ini harus direalisasikan secara bersamaan untuk bisa dirasakan manfaatnya.

Investasi yang dikucurkan untuk pembangunan e-government ini haruslah dibarengi dengan regulasi e-government, tata kelola TIK yang baik, kualitas dan kuantitas SDM yang memadai, dan komitmen kuat dari Pimpinan Kota di segala level untuk menjamin agar pembangunan e-government tidak sia-sia. Dimana perlu disadari kalau semua sarana prasarana terutama perangkat TIK memiliki lifetime terbatas. Pemeliharaan perangkat TIK tanpa ilmu yang memadai dan dana mencukupi akan menambah permasalahan dan melenceng dari tujuan e-government sendiri yaitu efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah kota.